

## IMPLEMENTASI PERWALI SURABAYA NO. 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Dida Rahmadanik<sup>1</sup>, Nurul Ika Mardyani<sup>2</sup>, Indah Murti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Administrasi Negara, Fisip, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: didarahma@untag-sby.ac.id

Received: 26 Januari 2022 | Revised: 18 November 2022 | Accepted: 21 November 2022

*Abstract: Based on the Surabaya Mayor Regulation Number 5 of 2013 concerning Guidelines for the Use of Information and Communication Technology in the Implementation of Regional Government, that in each agency making innovations which utilizes information and communication technology in providing services based on convenience for users; without barriers between one institution and another; transparent and the availability of public information; fairness; accountable; and service standardization. But in reality many teachers have difficulty in using it. This study aims to describe the application of the SLAGUS application at SMPN 52 Surabaya along with its supporting and inhibiting factors. This type of research is using descriptive qualitative. The focus of his research uses the theory of indicators of successful implementation of e-government based on the results of a study from the Harvard JFK School of Government namely Support, Capacity, and Value. The results of this study indicate that the application of the SLAGUS application at SMPN 52 Surabaya is quite good when viewed from the indicators of Support, Capacity, and Value but there are still teachers who do not understand how to use the SLAGUS application so that in-depth assistance is needed by forming small groups and additional appointments. operators to be included in the group. In addition, server errors were also encountered so that there was a need for repairs or additional capacity on the central server at the Surabaya City Education Office.*

*Keyword: implementation; e-government; SLAGUS*

Abstrak: Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa dalam tiap instansi membuat inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pelayanan yang berasaskan pada kemudahan bagi pengguna; tanpa jarak antara satu instansi dengan instansi lain. Namun pada kenyataannya banyak guru yang mengalami kesulitan dalam menggunakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai penerapan aplikasi SIAGUS di SMPN 52 Surabaya beserta dengan faktor pendukung dan penghambatnya. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Fokus penelitiannya menggunakan teori indikator keberhasilan penerapan *e-government* berdasarkan hasil kajian dari Harvard JFK School of Government yaitu *Support*, *Capacity*, dan *Value*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SIAGUS di SMPN 52 Surabaya cukup baik apabila dilihat dari indikator *Support*, *Capacity*, dan *Value* namun juga masih ditemukan guru yang kurang paham dalam menggunakan aplikasi SIAGUS sehingga perlu dilakukan pendampingan secara mendalam dengan cara membentuk kelompok kecil dan penunjukan tambahan operator untuk dimasukkan ke dalam kelompok tersebut. Selain itu juga ditemui server error sehingga perlu adanya perbaikan atau penambahan kapasitas pada server pusat di Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Kata kunci: implementasi; *e-governement*; SIAGUS

---

**Cara Mengutip:** Rahmadanik, D., Mardyani, N. I., & Murti, I. (2022). Evaluasi Perkembangan Kawasan Transmigrasi Wilayah Pamulutan Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 12(2), 207-223. Doi: <https://doi.org/10.33366/rfr.v%0vi%0i.3156>

---

## PENDAHULUAN

Pemerintahan yang baik atau yang disebut dengan *Good Governance* berdasarkan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil pasal 2 dirumuskan pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. *Good governance* adalah pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan bertanggungjawab kepada publik secara profesional, bertanggungjawab, dan adil (Novianti, 2015). *Good governance* ini sebagai sebuah konsep yang mana dalam melaksanakan pemerintahan yang baik perlu adanya suatu inovasi. Adanya kemajuan di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi mengharuskan pemerintah berupaya untuk melakukan inovasi dengan memanfaatkan perkembangan tersebut. Inovasi dilakukan dalam rangka mewujudkan *good governance* yang menciptakan kondisi efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Inovasi tersebut dituangkan dalam bentuk sistem elektronik yang digunakan dalam pemerintahan atau yang biasa disebut dengan *e-government*. *Electronic government* atau *e-gov* merupakan bentuk implementasi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berbasis sistem informasi digital. Kemudian The World Group (dalam Suaedi & Wardiyanto, 2010) mendefinisikan *E-government* adalah sebagai upaya dalam memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan layanan yang baik kepada masyarakat sebagai perwujudan *good governance*. Pada awal penerapannya, *e-government* atau *e-gov* hanya menyediakan informasi dan data-data yang berbasis digital tentang penyelenggaraan pemerintahan sebagai wujud penerapan keterbukaan informasi kepada masyarakat (*transparancy*). Kemudian *e-gov* berkembang pelayanannya menjadi sarana komunikasi baik secara internal maupun eksternal dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya ataupun adanya layanan interaktif dengan masyarakat.

*E-gov* dalam perkembangannya memiliki empat jenis yakni *Government to Government* (G2G), *Government to Business* (G2B), *Government to Citizens* (G2C), dan *Government to Employees* (G2E) (Indrajit, 2016). Jenis G2G maksudnya adalah layanan informasi atau aplikasi dibuat oleh pemerintah dan digunakan antar pemerintah atau instansi dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Jenis G2B merupakan layanan informasi atau aplikasi yang dibuat oleh pemerintah yang digunakan oleh pemerintah dengan pelaku bisnis untuk urusan bisnis contohnya pengurusan izin usaha secara daring. Jenis G2C dibuat oleh pemerintah untuk digunakan oleh masyarakat dalam mendapatkan layanan pemerintah contohnya dalam pengurusan data kependudukan secara daring. Jenis G2E diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di instansi. Keempat jenis tersebut merupakan penerapan *e-government* dalam mencapai tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

Salah satu kota di Indonesia yakni Surabaya telah menerapkan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik. Oleh karena itu, walikota Surabaya membuat kebijakan mengenai pedoman pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman

Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan; meningkatkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.; sebagai sarana perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja pemerintahan. Selain itu, kebijakan ini berdasarkan asas kemudahan bagi pengguna; tanpa sekat antara satu instansi dengan instansi lain; keterbukaan dan ketersediaan informasi publik; perlakuan yang sesuai dan adil; dapat dipertanggungjawabkan; dan standarisasi layanan.

Saat ini, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di seluruh pemerintah kota Surabaya sudah menerapkan *e-government* ini dengan beragam jenis baik *web* maupun aplikasi yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun, tak terkecuali Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Salah satu *e-government* yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya adalah SIAGUS atau Sistem Aplikasi Guru Surabaya. SIAGUS pertama kali diluncurkan pada tanggal 17 Mei 2017 dan mulai diterapkan pada tanggal 13 September 2017. Aplikasi ini tidak hanya untuk guru atau tenaga pendidik saja namun juga untuk tenaga kependidikan baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Aplikasi SIAGUS memuat pengurusan administrasi meliputi kenaikan pangkat, sasaran kinerja pegawai, tunjangan kinerja, serta berbagai macam perizinan seperti izin cuti dan pensiun. Awal mula Siagus ini muncul dikarenakan dulu pada pengurusan kenaikan pangkat Kepala Dinas Pendidikan menerima keluhan para guru di Surabaya bahwa dalam pengurusan kenaikan pangkat tidak adanya transparansi apakah usulannya diterima atau tidak. Menjawab permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya meluncurkan aplikasi Siagus untuk mengurus administrasi guru tanpa dipungut biaya. Seperti yang dilansir dari media *online*, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya mengatakan, “*Seluruh pelayanan ini akan kami berikan secara gratis termasuk dalam mengurus kenaikan pangkat*”. Lebih lanjut, Kepala Dinas Pendidikan menyatakan bahwa pelayanan tersebut gratis karena sudah menggunakan sistem online dan jika terjadi penarikan biaya selama pengurusan, selanjutnya dimohon melaporkan ke dispendik (Lathifiyah, 2019).

Seiring berjalannya waktu, SIAGUS mengalami berbagai pembaharuan yang disesuaikan pada kondisi berlangsung seperti halnya pada saat pandemi ini. Berbagai terobosan atau inovasi telah diluncurkan seperti yang terbaru saat ini yaitu adanya jurnal kegiatan, absensi *online*, dan jurnal kelas untuk memudahkan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam memantau pembelajaran daring yang dilakukan oleh guru. Semua sekolah baik negeri maupun swasta wajib untuk menerapkan sistem terbaru tersebut. Berbagai pembaharuan tersebut menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan peneliti saat ini, ditemukan bahwa banyak guru dan tenaga kependidikan di Surabaya yang mengalami kesulitan dalam menerapkan pembaharuan tersebut.

Hal ini didukung juga pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yudhistiro Rekso Yudho bahwa seiring dengan adanya pembaruan sistem dan fitur yang baru masih banyak guru yang belum maksimal memanfaatkan aplikasi Siagus (Yudho & Fanida, 2017). Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang sejauh mana penerapan aplikasi SIAGUS sesuai implementasi kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2013 dengan mengambil lokasi penelitian di SMPN 52 Surabaya. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di SMPN 52 Surabaya adalah karena peneliti melakukan prasurvei yang dimana tenaga pendidik dan kependidikan di SMPN 52 Surabaya mengalami kesulitan dalam menerima

pembaharuan Siagus. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yudhistiro Rekso Yudho dan Eva Hany Fanida juga meneliti Siagus, namun yang membedakannya adalah pada penelitian tersebut lebih berfokus pada pelaksanaan menu kenaikan pangkat pada Siagus sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada penerapan aplikasi Siagus dengan semua menu pelayanannya. Selain itu, pada penelitian terdahulu tersebut menggunakan indikator faktor-faktor implementasi *electronic government* menurut Rahman et al., (2014) yang terdiri atas faktor institusional, faktor terkait sumber daya, faktor terkait akses, dan faktor legal. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan indikator keberhasilan penerapan e-government berdasarkan hasil kajian dan penelitian dari Harvard JFK *School of Government* (Gunawan, 2015) yaitu *Support*, *Capacity*, dan *Value*.

## KAJIAN PUSTAKA

### E-Government

Harvard JFK *School of Government*, menurut Indrajit dalam menerapkan konsep-konsep digitalisasi pada sektor publik terdapat tiga indikator keberhasilan yang perlu untuk diperhatikan (Gunawan, 2015). Manfaat penerapan sistem *e-government* akan tercapai apabila indikator keberhasilan diperhatikan oleh *stakeholder* yang menggunakan aplikasi atau *e-government* lainnya. Ketiga indikator keberhasilan tersebut antara lain:

#### 1. *Support*

*Support* dapat diartikan sebagai dukungan yang dimana dukungan ini dapat diartikan dukungan implementasi pada program *e-government* yang efektif. Dukungan tersebut dapat diwujudkan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, keuangan, tenaga, waktu, informasi, dan sebagainya) pada setiap lini pemerintahan untuk membangun konsep dengan semangat.
- b. Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktur pendukung agar tercipta lingkungan kondusif untuk mengembangkan *e-government*.
- c. Disosialisasikannya konsep *e-government* secara merata, berkesinambungan, konsisten, dan menyeluruh kepada seluruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai cara kampanye.

#### 2. *Capacity*

*Capacity* atau kapasitas ini maksudnya adalah adanya unsur kemampuan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan *e-government*. Kapasitas yang harus dimiliki dalam pengembangan *e-government* yaitu sumber daya finansial, sumber daya manusia, dan sumber daya infrastruktur. Terdapat tiga hal minimum yang harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan indikator ini, sebagai berikut:

- a. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-government* terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial.
- b. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai.
- c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki keahlian agar penerapan *e-government* sesuai dengan apa yang diharapkan.

#### 3. *Value*

*Value* atau nilai merupakan suatu nilai atau manfaat yang dapat diperoleh dari produk atau jasa yang didapatkan. Pemerintah harus teliti dan bijak dalam memilih prioritas jenis aplikasi

*e-government* apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar masyarakat benar-benar merasakan *valuenya*. Pelaksanaan program pemerintahan dapat dikatakan berjalan atau tidaknya diukur dari kebermanfaatannya atau *value* kepada masyarakat sebagai penerima layanan.

### SIAGUS (Sistem Aplikasi Guru Surabaya)

Suatu aplikasi yang diperuntukkan bagi guru dan tenaga kependidikan di sekolah jenjang TK (Taman Kanak-kanak), SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah menengah Pertama) baik negeri maupun swasta dalam lingkup Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Aplikasi ini memuat tentang pengurusan administrasi mengenai kepegawaian yang berkaitan dengan kinerja. SIAGUS ini merupakan salah satu bentuk *e-government* kota Surabaya khususnya Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam lingkup pendidikan sebagai perwujudan kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2013. SIAGUS pertama kali diluncurkan pada tanggal 17 Mei 2017 dan mulai diterapkan pada tanggal 13 September 2017.

Awal mula Siagus ini muncul dikarenakan dulu pada pengurusan administrasi kepegawaian yang dinilai kurang efektif dan efisien. Selain itu, juga tidak adanya transparansi apakah usulannya diterima atau tidak. Menjawab permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya meluncurkan aplikasi Siagus untuk mengurus administrasi guru tanpa dipungut biaya. Seperti yang dilansir dari media *online*, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya menyatakan bahwa seluruh pelayanan di Dinas Pendidikan Kota Surabaya gratis termasuk dalam mengurus kenaikan pangkat karena semua sistem pelayanan sudah menggunakan sistem *online* (Lathifiyah, 2019).



Gambar 1: Halaman Login SIAGUS

Sumber: [Siagus.dispendik.surabaya.go.id/login](http://Siagus.dispendik.surabaya.go.id/login), 2021

Pada halaman depan, terdapat pilihan *login* yang berbeda. Pilihan tersebut menandakan jabatan atau posisi untuk dapat mengakses SIAGUS. *Login* utama diperuntukkan bagi guru atau tenaga kependidikan yang berstatus ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ditandai dengan NIP (Nomor Induk Pegawai) sebagai *username* dan *password* yang dimiliki oleh masing-masing ASN. Staf Non PNS diperuntukkan bagi guru atau tenaga kependidikan yang berstatus non ASN dengan menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan) sebagai *username* dan *password* yang dimiliki oleh masing-masing. Antara ASN dan Non ASN dibedakan karena terdapat menu yang hanya diperuntukkan bagi ASN.

Pada beranda SIAGUS terdapat menu-menu yang berada di sisi kiri. Menu-menu tersebut berisi:

1. Absensi

Absensi digunakan untuk mengisi kehadiran melalui gawai milik pribadi dengan melakukan swafoto sesuai lokasi terkini. Pada absensi, terdapat pilihan WFO (*Work From Office*) dan WFH (*Work From Home*). Ketika pegawai sudah melakukan swafoto, maka akan muncul jam kedatangan, keterangan telat atau pulang cepat, serta jarak lokasi. Pada menu absensi, juga terdapat submenu rekap absensi yang digunakan untuk memantau rekap absensi yang telah dilakukan.

2. Dokumen dan Dokumen Kepegawaian

Menu ini berisi dokumen-dokumen atau berkas-berkas milik pegawai baik berkas kepegawaian ataupun berkas yang berkaitan dengan kinerja. Menu ini berfungsi sebagai gudang atau arsip berkas pegawai.

3. Laporan Tes Covid 19 dan Riwayat Keluarga Terkena Covid 19

Sejak adanya pandemi Covid 19, SIAGUS meluncurkan menu terbaru yakni laporan tes Covid 19 dan riwayat keluarga terkena covid 19 sebagai upaya dalam melakukan *tracing* dan pemantauan Dinas Pendidikan Kota Surabaya pada sekolah-sekolah naungannya sehingga dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan.

4. Cakep

Cakep akronimnya adalah Calon Kepala Sekolah yang dimana pada menu ini digunakan untuk seleksi kepala sekolah secara *online*.

5. SKP (Sasaran Kinerja Pegawai)

SKP ini digunakan oleh guru yang berstatus ASN dalam memenuhi target penilaian kinerja dan digunakan untuk penilaian kinerja guru.

6. Perilaku Kerja

7. Menu ini diperuntukkan bagi guru yang berstatus ASN dan menjabat sebagai guru senior untuk memberikan kinerja penilaian kepada guru-guru non senior.

8. Kenaikan Pangkat

9. Menu ini diperuntukkan bagi guru yang berstatus ASN untuk mengajukan kenaikan pangkat. Pada menu ini, terdapat daftar usulan-usulan dan angka kredit yang diperlukan untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat. Dalam pengurusan kenaikan pangkat ini, semuanya sudah berbasis *online* sehingga tidak perlu mengirimkan berkas fisik ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

10. Izin Guru

Pada menu ini, terdapat submenu perizinan seperti pensiun BUP (Batas Usia Pensiun), Pensiun Janda/Duda (diperuntukkan bagi suami/istri ASN yang meninggal sebelum memasuki usia pensiun), Cuti (Melahirkan, Ibadah, Sakit, Alasan penting), pengurusan KARPEG (Kartu Pegawai), KARIS (Kartu Istri ASN), KARSU (Kartu Suami ASN), Izin Belajar, dan Penelitian Ijazah. Menu ini diperuntukkan bagi guru dan tenaga kependidikan yang berstatus ASN.

11. Tukin (Tunjangan Kinerja)

12. Pada menu ini, terdapat tugas-tugas sesuai jabatan yang diberikan oleh kepala sekolah. Pada tukin ini, setiap guru yang berstatus ASN harus melaporkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan berikut bukti fisik yang harus diunggah sesuai jabatannya yang pada tiap tiga bulan sekali akan menerima tunjangan atas kinerja yang telah dijalankan.

13. Jurnal Kegiatan

Pada menu ini, semua guru dan tenaga kependidikan baik ASN maupun non ASN harus mengisi kegiatan pada hari itu juga. Menu ini berisi jam datang beserta foto yang terdapat *geotag*, jam pulang beserta foto *geotag*, serta foto kegiatan yang dilakukan. Menu ini berfungsi sebagai alat kontrol kepala sekolah untuk memantau kegiatan yang dilakukan oleh guru dan tenaga kependidikan di sekolahnya.

14. Jurnal Kelas

Pada menu ini diperuntukkan bagi guru baik ASN maupun non ASN yang digunakan untuk mengisi kegiatan pembelajaran pada kelas. Jurnal kelas ini juga sebagai alat kontrol kepala sekolah untuk memantau pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya.

15. Riwayat

Riwayat ini terdapat submenu riwayat pekerjaan, pendidikan, pelatihan, data keluarga, narasumber/pemateri, organisasi, kunjungan tugas kedinasan, karya tulis/inovasi, kerjasama instansi, penyakit diderita. Menu ini berfungsi sebagai arsip dan alat kontrol kepala sekolah dan Dinas Pendidikan untuk memantau riwayat para guru dan tenaga kependidikan.

16. Tempat Tinggal

Menu ini berfungsi untuk menentukan titik koordinat lokasi tempat tinggal atau domisili guru atau tenaga kependidikan. Titik lokasi ini digunakan sebagai dasar absensi apabila guru atau tenaga kependidikan melakukan WFH.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan deksriptif kualitatif. Karakteristik penelitian kualitatif antara lain bersifat alamiah, datanya bersifat deskriptif, menekankan proses yang terjadi, analisis data cenderung secara induktif, serta menggali informasi berdasarkan sudut pandang informan (Ahmad, 2015). Fokus penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan aplikasi SIAGUS di SMPN 52 Surabaya menggunakan indikator keberhasilan penerapan *e-government* berdasarkan kajian riset dari Harvard JFK School of Government (Gunawan, 2015) yaitu *Support*, *Capacity*, dan *Value* serta menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya. Sumber datanya terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui observasi serta wawancara yang akan dilakukan peneliti kepada pelaksana atau pengguna aplikasi SIAGUS antara lain: (1) Kepala SMPN 52 Surabaya (2) Perwakilan Guru (3) Perwakilan Operator Sekolah/Tenaga Administrasi. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari SMPN 52 Surabaya berupa dokumen atau arsip yang berkaitan dengan penerapan aplikasi SIAGUS di SMPN 52 Surabaya. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2013) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Aplikasi SIAGUS di SMPN 52 Surabaya

*E-government* merupakan salah satu cara bagi suatu instansi untuk meningkatkan pemberian layanan secara digital dalam rangka mewujudkan efektif dan efisien. Tak terkecuali *e-government* yang berbentuk aplikasi seperti SIAGUS. Aplikasi SIAGUS merupakan aplikasi

yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang kemudian digunakan oleh sekolah-sekolah di bawah naungannya. Aplikasi SIAGUS ini memuat tentang pengurusan administrasi mengenai kepegawaian yang berkaitan dengan kinerja. SIAGUS ini merupakan salah satu bentuk *e-government* kota Surabaya khususnya Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam lingkup pendidikan sebagai perwujudan kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Aplikasi SIAGUS sebagai *e-government* milik Dinas Pendidikan Kota Surabaya diterapkan sebagai bentuk dari konsep *good governance*. Berdasarkan Laporan Kajian Tahun 2007 milik LAN, UNDP mengajukan karakteristik *good governance* yang di antaranya adalah partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi, stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Pada penerapan aplikasi SIAGUS, memuat beberapa karakteristik tersebut. Bila ditinjau dari hasil wawancara terdapat karakteristik *good governance* yang paling menonjol pada aplikasi SIAGUS yaitu adanya efektivitas dan efisiensi. Berdasarkan hasil wawancara, aplikasi SIAGUS dinilai efektif dan efisien dikarenakan pada penggunaannya menggunakan internet sehingga dapat dilakukan dimana saja asalkan terhubung dengan internet. Selain itu, dikarenakan terhubung dengan internet sehingga penggunaannya lebih cepat dan meminimalisir penggunaan kertas sehingga menghemat waktu dan tenaga.

Aplikasi SIAGUS ini digunakan oleh guru dan tenaga kependidikan yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Oleh karena itu, apabila ditinjau dari jenis *e-government* menurut Indrajit pada bukunya yang berjudul *Electronic Government: Seri Bunga Rampai Pemikiran Ekoji Edisi 2* (Indrajit, 2016) maka aplikasi SIAGUS termasuk pada jenis G2E atau *Government to Employee* yakni yang dapat diartikan relasi Dinas Pendidikan Kota Surabaya kepada para guru dan tenaga kependidikan yang dimana aplikasi atau *e-government* ini diterapkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para guru dan tenaga kependidikan. Menurut Gartner Group (Baum & Maio) dalam jurnal milik Marudur Pandapotan Damanik, Erisva Hakiki Purwaningsih yang berjudul *E-Government dan Aplikasinya di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau)* (Damanik & Purwaningsih, 2017) bahwa terdapat empat tahap model kematangan *e-government* antara lain presensi, interaksi, transaksi, dan transformasi. Apabila ditinjau dari keempat tahapan tersebut, aplikasi SIAGUS termasuk ke dalam tahapan interaksi dikarenakan aplikasi SIAGUS selain memberikan informasi kepada pengguna tetapi juga memberikan kewenangan kepada pengguna untuk mengunggah berkas atau data-data yang diperlukan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa dalam pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas kemudahan bagi pengguna, tanpa sekat atau jarak, keterbukaan informasi, perlakuan yang adil, akuntabel, dan standarisasi pelayanan. Berdasarkan hal tersebut, aplikasi SIAGUS diluncurkan dengan tujuan untuk memberi kemudahan bagi guru dalam mengurus administrasi kepegawaian secara efektif dan efisien. Ditambah dalam perubahan zaman yang cepat, kebutuhan dalam hal digitalisasi juga bertambah. Sehingga, dengan adanya aplikasi SIAGUS diharapkan memenuhi kebutuhan



tersebut bagi guru di sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, khususnya di SMPN 52 Surabaya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yudhistiro Rekso Yudho dan Eva Hany Fanida (Yudho & Fanida, 2017) yang berjudul Implementasi Layanan Sistem Aplikasi Guru Surabaya (SIAGUS) di Dinas Pendidikan Kota Surabaya menggunakan aplikasi SIAGUS sebagai obyek penelitiannya yang dimana juga sama dengan yang peneliti ambil yaitu aplikasi SIAGUS. Namun, perbedaannya ada pada fokus penelitiannya. Pada penelitian milik Yudhistiro Rekso Yudho dan Eva Hany Fanida, meneliti implementasi SIAGUS di lingkup Dinas Pendidikan Kota Surabaya menggunakan teori faktor implementasi *electronic government* menurut Shams Rahman, Nahid Rashid, Aswini Yadlapalli, dan Li Yiqun (2014) yaitu faktor institusional, faktor sumber daya, faktor terkait akses, dan faktor legal/peraturan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah mengenai penerapan aplikasi SIAGUS di SMPN 52 Surabaya menggunakan teori hasil kajian dari Harvard JFK School of Government yaitu *Support, Capacity*, dan *Value*. Selain itu pada penelitian yang dilakukan oleh Yudhistiro Rekso Yudho dan Eva Hany Fanida berfokus pada layanan kenaikan pangkat online. Sedangkan milik peneliti, berfokus pada penggunaan layanan keseluruhan di aplikasi SIAGUS.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Aplikasi SIAGUS di SMPN 52 Surabaya

*E-government* merupakan salah satu cara bagi suatu instansi untuk meningkatkan pemberian layanan secara digital dalam rangka mewujudkan efektif dan efisien. Tak terkecuali *e-government* yang berbentuk aplikasi seperti SIAGUS. Aplikasi SIAGUS merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang kemudian digunakan oleh sekolah-sekolah di bawah naungannya. Aplikasi SIAGUS ini memuat tentang pengurusan administrasi mengenai kepegawaian yang berkaitan dengan kinerja. SIAGUS ini merupakan salah satu bentuk *e-government* kota Surabaya khususnya Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam lingkup pendidikan sebagai perwujudan kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Aplikasi SIAGUS sebagai *e-government* milik Dinas Pendidikan Kota Surabaya diterapkan sebagai bentuk dari konsep *good governance*. Berdasarkan Laporan Kajian Tahun 2007 milik LAN, UNDP mengajukan karakteristik *good governance* yang di antaranya adalah partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi, stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Pada penerapan aplikasi SIAGUS, memuat beberapa karakteristik tersebut. Bila ditinjau dari hasil wawancara terdapat karakteristik *good governance* yang paling menonjol pada aplikasi SIAGUS yaitu adanya efektivitas dan efisiensi. Berdasarkan hasil wawancara, aplikasi SIAGUS dinilai efektif dan efisien dikarenakan pada penggunaannya menggunakan internet sehingga dapat dilakukan dimana saja asalkan terhubung dengan internet. Selain itu, dikarenakan terhubung dengan internet sehingga penggunaannya lebih cepat dan meminimalisir penggunaan kertas sehingga menghemat waktu dan tenaga.

Aplikasi SIAGUS ini digunakan oleh guru dan tenaga kependidikan yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Oleh karena itu, apabila ditinjau dari jenis *e-government* menurut Indrajit pada bukunya yang berjudul *Electronic Government: Seri Bunga Rampai*

Pemikiran Ekoji Edisi 2 (Indrajit, 2016) maka aplikasi SIAGUS termasuk pada jenis G2E atau *Government to Employee* yakni yang dapat diartikan relasi Dinas Pendidikan Kota Surabaya kepada para guru dan tenaga kependidikan yang dimana aplikasi atau *e-government* ini diterapkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para guru dan tenaga kependidikan. Menurut Gartner Group (Baum & Maio) dalam jurnal milik Marudur Pandapotan Damanik, Erisva Hakiki Purwaningsih yang berjudul *E-Government dan Aplikasinya di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau)* (Damanik & Purwaningsih, 2017) bahwa terdapat empat tahap model kematangan e-government antara lain presensi, interaksi, transaksi, dan transformasi. Apabila ditinjau dari keempat tahapan tersebut, aplikasi SIAGUS termasuk ke dalam tahapan interaksi dikarenakan aplikasi SIAGUS selain memberikan informasi kepada pengguna tetapi juga memberikan kewenangan kepada pengguna untuk mengunggah berkas atau data-data yang diperlukan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bahwa dalam pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan dengan asas kemudahan bagi pengguna, tanpa sekat atau jarak, keterbukaan informasi, perlakuan yang adil, akuntabel, dan standarisasi pelayanan. Berdasarkan hal tersebut, aplikasi SIAGUS diluncurkan dengan tujuan untuk memberi kemudahan bagi guru dalam mengurus administrasi kepegawaian secara efektif dan efisien. Ditambah dalam perubahan zaman yang cepat, kebutuhan dalam hal digitalisasi juga bertambah. Sehingga, dengan adanya aplikasi SIAGUS diharapkan memenuhi kebutuhan tersebut bagi guru di sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Surabaya, khususnya di SMPN 52 Surabaya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yudhistiro Rekso Yudho dan Eva Hany Fanida (Yudho & Fanida, 2017) yang berjudul *Implementasi Layanan Sistem Aplikasi Guru Surabaya (SIAGUS) di Dinas Pendidikan Kota Surabaya* menggunakan aplikasi SIAGUS sebagai obyek penelitiannya yang dimana juga sama dengan yang peneliti ambil yaitu aplikasi SIAGUS. Namun, perbedaannya ada pada fokus penelitiannya. Pada penelitian milik Yudhistiro Rekso Yudho dan Eva Hany Fanida, meneliti implementasi SIAGUS di lingkup Dinas Pendidikan Kota Surabaya menggunakan teori faktor implementasi *electronic government* menurut Rahman et al., (2014) yaitu faktor institusional, faktor sumber daya, faktor terkait akses, dan faktor legal/peraturan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah mengenai penerapan aplikasi SIAGUS di SMPN 52 Surabaya menggunakan teori hasil kajian dari Harvard JFK School of Government yaitu *Support, Capacity, dan Value*. Selain itu pada penelitian yang dilakukan oleh Yudhistiro Rekso Yudho dan Eva Hany Fanida berfokus pada layanan kenaikan pangkat online. Sedangkan milik peneliti, berfokus pada penggunaan layanan keseluruhan di aplikasi SIAGUS.

Berdasarkan hasil data yang telah diuraikan pada penyajian data terkait penerapan aplikasi SIAGUS di SMPN 52 Surabaya maka dapat dilakukan analisis dengan menggunakan teori indikator keberhasilan penerapan *e-government* hasil dari kajian Harvard JFK School of Government (Gunawan, 2015). Indikator keberhasilan tersebut antara lain *Support, Capacity, dan Value*. Manfaat penerapan sistem *e-government* akan tercapai apabila indikator keberhasilan tersebut diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan hasil penyajian data, berikut

adalah paparan penerapan aplikasi SIAGUS di SMPN 52 Surabaya dengan menggunakan teori indikator keberhasilan hasil kajian dari Harvard JFK *School of Government*.

### 1. *Support*

*Support* atau dukungan ini adalah yang diberikan oleh pimpinan, dikarenakan budaya organisasi yang cenderung bersifat *top down*. Sehingga penerapan *e-government* ini dinilai lebih efektif apabila dimulai dari pimpinan. Maka dari itu, penerapan *e-government* berupa aplikasi SIAGUS di SMPN 52 Surabaya indikator *support* dilakukan oleh kepala sekolah. *Support* ini tidak hanya berupa motivasi atau omongan saja tetapi dibuktikan dengan aksi atau tindakan yang nyata. Pada indikator ini, terdapat beberapa komponen antara lain dialokasikannya sumber daya, dibangunnya infrastruktur dan superstruktur, dan disosialisasikannya konsep *e-government* secara merata.

Pada komponen pertama, sumber daya yang dimaksud yaitu sumber daya manusia dan keuangan sehingga dalam hal ini alokasi sumber daya merupakan penyediaan sumber daya manusia dan keuangan dalam penerapan aplikasi SIAGUS di SMPN 52 Surabaya. Berdasarkan hasil penyajian data, di SMPN 52 Surabaya telah menyediakan sumber daya manusia yang dimana terdapat penunjukan seseorang menjadi operator sekolah. Operator sekolah merupakan orang yang diberi tugas untuk membantu guru dalam menggunakan aplikasi SIAGUS serta menjadi penghubung informasi dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya kepada guru dan sebaliknya. Penunjukan tersebut dilakukan oleh kepala sekolah. Kriteria dalam penunjukan operator sekolah adalah yang paham dengan IT, serta terbiasa dalam menggunakan aplikasi-aplikasi milik Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Sedangkan pada sumber daya keuangan juga telah disediakan alokasi anggaran untuk pengadaan fasilitas penunjang guru dalam menggunakan aplikasi SIAGUS dan aplikasi lainnya. Anggaran tersebut telah dimasukkan ke dalam RAKS (Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kepala SMPN 52 Surabaya telah mengalokasikan sumber daya manusia dan keuangan dalam kaitannya dengan penerapan aplikasi SIAGUS di SMPN 52 Surabaya.

Pada komponen kedua, infrastruktur dan superstruktur yang dimaksud disini berarti fasilitas penunjang dalam penerapan aplikasi SIAGUS. Berdasarkan hasil penyajian data, di SMPN 52 Surabaya telah terdapat fasilitas penunjang. Fasilitas tersebut di antaranya adalah adanya komputer dan internet yang terpasang di setiap ruang yang biasanya digunakan oleh guru yaitu di ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang guru, ruang sumber inklusi, serta perpustakaan. Kecepatan internet pun juga sudah cukup memadai yakni minimal 20 mbps hingga 50 mbps. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di SMPN 52 Surabaya telah disediakan fasilitas penunjang bagi guru untuk menggunakan aplikasi SIAGUS dan aplikasi lainnya.

Pada komponen ketiga, sebuah *e-governemnt* harus disosialisasikan mengenai cara penggunaannya, isinya apa saja, dan sebagainya. Berdasarkan hasil penyajian data, pada penerapan aplikasi SIAGUS telah dilakukan sosialisasi. Sosialisasi tersebut dilakukan pada awal diluncurkan SIAGUS serta ketika terdapat menu baru pada aplikasi SIAGUS. Sosialisasi tersebut diikuti oleh guru dan dipimpin langsung oleh kepala sekolah dan operator sekolah yang sebelumnya dibekali dengan sosialisasi dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Sosialisasi dilakukan dengan harapan guru dapat menggunakan aplikasi SIAGUS

dan dapat beradaptasi pada perubahan atau penambahan menu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sosialisasi mengenai aplikasi SIAGUS di SMPN 52 Surabaya telah dilakukan.

## 2. *Capacity*

*Capacity* atau kapasitas ini berdasarkan hasil kajian dari Harvard JFK *School of Government* merupakan adanya unsur kemampuan dari pemerintah dalam mewujudkan keberhasilan *e-government* (Gunawan, 2015). Pemerintah dalam hal ini berarti penguasa atau pemimpin dalam suatu organisasi. Sehingga, pada penerapan aplikasi SIAGUS di SMPN 52 Surabaya, kepala sekolah menjadi penguasa yang bertanggungjawab atau berkapasitas dalam mewujudkan penerapan aplikasi SIAGUS di SMPN 52 Surabaya. Pada indikator ini terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Komponen tersebut diantaranya adalah ketersediaan sumber daya yang cukup terutama sumber daya finansial, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, dan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi.

Pada komponen pertama yakni ketersediaan yang cukup terutama sumber daya finansial atau keuangan untuk penerapan *e-government*. Pada penerapan aplikasi SIAGUS di SMPN 52 Surabaya, telah tersedia anggaran untuk pengadaan fasilitas penunjang. Anggaran tersebut dituangkan pada RAKS (Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah). Di dalamnya terdapat jenis dari fasilitas, jumlah, serta waktu pengadaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di SMPN 52 Surabaya telah tersedia anggaran untuk pengadaan fasilitas untuk menunjang penerapan aplikasi SIAGUS.

Pada komponen kedua, yakni ketersediaan infrastruktur teknologi dan informasi yang memadai untuk penerapan aplikasi SIAGUS di SMPN 52 Surabaya. Berdasarkan hasil penyajian data, di SMPN 52 telah terdapat fasilitas berupa jaringan internet, komputer, serta printer yang digunakan untuk mengakses aplikasi SIAGUS dan aplikasi lainnya. Pada pengadaan fasilitas itupun juga tidak terlepas dari anggaran sekolah. Pengadaan fasilitas berupa perangkat keras seperti komputer atau laptop, dan printer dilakukan setiap tahun untuk memperbarui atau mengganti perangkat yang rusak. Sedangkan pada jaringan internet telah terpasang pada beberapa titik yang bisa dijangkau oleh guru. Kecepatan internet juga sudah mumpuni yang difasilitasi minimal 20 mbps. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam ketersediaan infrastruktur teknologi dan informasi dalam penerapan aplikasi SIAGUS di SMPN 52 Surabaya sudah memadai.

Pada komponen ketiga, yakni ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam penerapan aplikasi SIAGUS di SMPN 52 Surabaya. Berdasarkan hasil penyajian data pada penerapan aplikasi SIAGUS di SMPN 52 Surabaya mengenai sumber daya manusia telah ditunjuk operator sekolah yang tugasnya membantu guru dalam menggunakan aplikasi SIAGUS serta menjadi penghubung informasi dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya kepada guru dan sebaliknya. Penunjukan operator sekolah dilakukan oleh kepala sekolah dengan kriteria yang paham dengan IT, serta terbiasa dalam menggunakan aplikasi-aplikasi milik Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Sehingga, ketika guru mengalami kesulitan baik itu masih tidak mengerti atau mengalami kendala eror dalam pengerjaan, maka operator sekolah sigap untuk membantu. Ketika operator sekolah yang mengalami kesulitan maka terdapat suatu forum pada grup *Whatsapp* untuk mengutarakan kendala yang dihadapi. Di dalam forum tersebut anggotanya adalah sesama operator sekolah di Surabaya dan juga terdapat pegawai Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di

SMPN 52 Surabaya terdapat sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan.

### 3. *Value*

Value merupakan nilai atau manfaat dari *e-government* yang diperoleh bagi pengguna. Berdasarkan hasil penyajian data, manfaat dari aplikasi SIAGUS ini beragam. Secara keseluruhan, aplikasi SIAGUS ini memuat pengurusan administrasi kepegawaian serta kelengkapan pembelajaran dan absensi yang prosesnya lebih efektif dan efisien bila dibandingkan dengan sebelum adanya aplikasi SIAGUS. Guru di SMPN 52 Surabaya secara keseluruhan juga sudah paham dengan manfaat aplikasi SIAGUS. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya aplikasi SIAGUS dapat memberikan manfaat kepada guru sehingga dapat meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi.

## **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dari Penerapan Aplikasi SIAGUS di SMPN 52 Surabaya**

Dalam pemberian pelayanan terlebih pada penggunaan *e-government* tentu terdapat faktor pendukung yang membuat *e-government* tersebut sukses diterapkan dan juga terdapat faktor penghambat yang membuat penerapan *e-government* sedikit terkendala. Sama halnya dengan penerapan aplikasi SIAGUS di SMPN 52 Surabaya. Penerapan aplikasi SIAGUS di SMPN 52 Surabaya juga terdapat faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Faktor-faktor tersebut didapat dari penyajian data. Berikut faktor pendukung dan penghambat dari penerapan aplikasi SIAGUS di SMPN 52 Surabaya.

### 1. Faktor Pendukung

Kesuksesan penerapan *e-government* dalam hal ini yakni aplikasi SIAGUS tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukungnya. Faktor pendukung ini merupakan hasil analisis dari penyajian data berdasarkan indikator kesuksesan penerapan *e-government* berdasarkan hasil kajian Harvard JFK School of Government. Faktor pendukung ini dipilih yang turut andil besar dalam penerapan aplikasi SIAGUS di SMPN 52 Surabaya. Berikut adalah penjelasan faktor pendukung dari penerapan aplikasi SIAGUS di SMPN 52 Surabaya.

#### a. Adanya fasilitas yang memadai.

Fasilitas yang memadai menjadi kunci kesuksesan dari penerapan aplikasi SIAGUS. Berdasarkan buku milik Cakti Indra Gunawan yang berjudul Sistem Informasi Manajemen dan E-Government (Gunawan, 2015) bahwa fasilitas yang memadai merupakan 50% kunci keberhasilan dari penerapan *e-government*. Berdasarkan hasil penyajian data, di SMPN 52 Surabaya telah terdapat fasilitas yang dapat menunjang penerapan aplikasi SIAGUS. Fasilitas tersebut berupa jaringan internet, komputer, serta printer yang digunakan untuk mengakses aplikasi SIAGUS dan aplikasi lainnya. Pada pengadaan fasilitas itupun juga tidak terlepas dari anggaran sekolah. Pengadaan fasilitas berupa perangkat keras seperti komputer atau laptop, dan printer dilakukan setiap tahun untuk memperbarui atau mengganti perangkat yang rusak. Sedangkan pada jaringan internet telah terpasang pada beberapa titik yang bisa dijangkau oleh guru. Kecepatan internet juga sudah mumpuni yang difasilitasi minimal 20 mbps. Sehingga, dengan adanya fasilitas ini yang menjadi salah satu faktor kesuksesan penerapan aplikasi SIAGUS di SMPN 52 Surabaya.

#### b. Adanya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan

Sumber daya manusia menjadi hal yang penting dalam penerapan aplikasi SIAGUS karena agar dapat mencapai manfaat yang diharapkan. Dalam kaitannya dengan faktor pendukung, sumber daya manusia yang dimaksud adalah adanya operator sekolah yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk membantu guru dalam mengakses SIAGUS. Berdasarkan hasil penyajian data, operator sekolah ini ditunjuk yang tugasnya membantu guru dalam menggunakan aplikasi SIAGUS serta menjadi penghubung informasi dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya kepada guru dan sebaliknya. Penunjukan operator sekolah dilakukan oleh kepala sekolah dengan kriteria yang paham dengan IT, serta terbiasa dalam menggunakan aplikasi-aplikasi milik Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Berdasarkan penyajian data juga diketahui bahwa guru merasa terbantu dengan adanya operator sekolah ini karena ketika mengalami kesulitan ada operator sekolah yang sigap membantu. Sehingga, dengan adanya operator sekolah menjadi salah satu faktor kesuksesan penerapan aplikasi SIAGUS di SMPN 52 Surabaya.

c. Adanya anggaran pengadaan fasilitas

Anggaran sekolah atau yang biasanya tertuang pada RAKS (Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah) memuat pembelanjaan-pembelanjaan dalam menunjang kegiatan belajar mengajar serta kebutuhan mengenai sarana prasarana atau kegiatan lainnya. Di dalamnya terdapat jenis dari fasilitas, jumlah, serta waktu pengadaan. Dalam kaitannya dengan penerapan aplikasi SIAGUS ini pada anggaran sekolah terdapat pengadaan fasilitas-fasilitas untuk menunjang penerapan aplikasi SIAGUS di Surabaya. Fasilitas-fasilitas penunjang tersebut seperti jaringan internet, komputer atau laptop, serta printer. Pengadaan tersebut yang telah tertuang pada anggaran dilaksanakan tiap tahun karena untuk pembaruan perangkat atau mengganti perangkat yang rusak. Dengan adanya fasilitas tersebut, diharapkan penerapan aplikasi SIAGUS di SMPN 52 Surabaya berhasil dan semua guru dapat menggunakannya.

2. Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan penerapan aplikasi SIAGUS ini juga terdapat permasalahan sehingga dalam pelaksanaan penerapan aplikasi SIAGUS sedikit terkendala. Permasalahan tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor diantaranya adalah sumber daya pengguna yang minim serta server dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang beberapa waktu sering *down*. Berdasarkan hasil penyajian data ditemukan bahwa terdapat beberapa guru yang masih mengalami kesulitan walaupun sudah diberi sosialisasi juga praktek. Sehingga perlu dilakukan pendampingan berulang untuk membantu guru tersebut supaya dapat menggunakan aplikasi SIAGUS. Selain itu di antara guru tersebut juga mengalami kesulitan dalam memahami dan lupa mengenai langkah-langkahnya terlebih pada guru yang usianya mendekati pensiun dan memiliki kemampuan IT yang rendah. Selain itu, dikarenakan merasa kesulitan akhirnya menyerahkan sepenuhnya kepada operator sekolah atau staf Tata Usaha lainnya. Selain itu, faktor penghambat lainnya adalah server dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang terkadang mengalami penurunan. Sehingga terkadang tidak dapat diakses atau terjadi eror.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan aplikasi SIAGUS di SMPN 52 Surabaya sudah cukup baik sebagaimana yang telah dilakukan penelitian berdasarkan fokus penelitian sebagai berikut:

Penerapan aplikasi SIAGUS di SMPN 52 Surabaya dilaksanakan sebagai implementasi dari Peraturan Walikota Surabaya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penerapan aplikasi SIAGUS di SMPN 52 Surabaya apabila ditinjau dari indikator keberhasilan penerapan *e-government* berdasarkan hasil kajian dari Harvard JFK *School of Government* antara lain sebagai berikut. Penerapan aplikasi SIAGUS di SMPN 52 Surabaya apabila ditinjau dari indikator Support baik dari komponen alokasi sumber daya, dibangunnya infrastruktur dan superstruktur, dan sosialisasi sudah terlaksana dan sudah memenuhi.

Penerapan aplikasi SIAGUS di SMPN 52 Surabaya apabila ditinjau dari indikator Capacity baik dari komponen ketersediaan sumber daya finansial, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, dan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki keahlian sudah terpenuhi. Penerapan aplikasi SIAGUS di SMPN 52 Surabaya apabila ditinjau dari indikator Value sudah dimiliki oleh para pengguna yaitu guru sudah paham manfaat aplikasi SIAGUS apa saja. Dalam mewujudkan penerapan aplikasi SIAGUS di SMPN 52 Surabaya terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya yaitu adanya fasilitas yang memadai, adanya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan, dan adanya anggaran pengadaan fasilitas. Faktor penghambatnya yaitu sumber daya manusia dari segi pengguna yaitu guru yang mempunyai kemampuan IT minim serta adanya gangguan server yang terkadang *down* sehingga menyebabkan eror.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi* (I). Gava Media.
- Damanik, M. P., & Purwaningsih, E. H. (2017). E-Government dan Aplikasinya di Lingkungan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kualitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau). *Studi Komunikasi Dan Media*, 21, 151–164. <http://marefateadyan.nashriyat.ir/node/150>
- Firmansyah, R. R., & Niswah, F. (2018). Inovasi Pelayanan E-MASTER di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Mahasiswa UNESA*, 6.
- Gunawan, C. I. (2015). *Sistem Informasi Manajemen & E-Government* (B. C. Dharmawan (ed.)). CV. IRDH (Research & Publishing).
- Indrajit, R. E. (2016). *ELECTRONIC GOVERNMENT: Seri Bunga Rampai Pemikiran EKOJI Edisi 2*. Preinexus.
- Lathifiyah, K. (2019). *Begini Pemkot Surabaya Layani Pengurusan SK Kenaikan Pangkat Guru*. <https://jatimnet.com/begini-pemkot-surabaya-layani-pengurusan-sk-kenaikan-pangkat-guru>
- Novianti, L. (2015). *Public Sector Governance Pada Pemerintah Daerah*. 7, 1–8. [http://repository.uin-suska.ac.id/16746/1/Ringkasan buku Public sector gov LENY nOFIANTI.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/16746/1/Ringkasan%20buku%20Public%20sector%20gov%20LENY%20NOFIANTI.pdf)
- Sadat, A. (2019). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara. *Buletin Utama Teknik*, 14(3), 200–204. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/but/article/view/1273>

- Suaedi, F., & Wardiyanto, B. (2010). *Revitalisasi Administrasi Negara : Reformasi Birokrasi dan e-Government*. Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Yudho, Y. R., & Fanida, E. H. (2017). *Implementasi Layanan Sistem Aplikasi Guru Surabaya ( SLAGUS ) di Dinas Pendidikan Kota Surabaya*. 2014, 1–9.